

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemenangan atau kekalahan petahana pada kontestasi politik pemilu dan bencana secara global mengalami dinamika dan temuan yang bertentangan satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian telah melakukan kajian terhadap efek bencana alam terhadap hasil pemilu. Studi-studi ini adalah bagian dari agenda penelitian yang lebih luas tentang demokrasi *representatif*, karena memberikan wawasan tentang logika yang mendasari ketergantungan pemilih pada pemungutan suara retrospeksi atau kemampuan pemilih untuk mengevaluasi tindakan pejabat terpilih yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dan menghargai atau menghukum mereka pada saat pemilihan dilakukan (Heersink dkk, 2022).

Pemilih dapat menghukum pejabat terpilih dengan menentukan pilihannya berdasarkan perlakuan dari pejabat seperti apa yang disebutkan Achen dan Bartels sebagai retrospeksi buta yaitu tindakan tanpa pandang bulu menyerang politisi yang berkuasa karena rasa sakit atau tidak nyaman yang mereka alami dengan sikap dari pejabat yang berkuasa (Achen dan Bartels, 2016). Transisi masa pemulihan pembangunan pasca terjadinya bencana alam dapat menjadi arena pertarungan politik bagi kandidat. Healy dan Malhotra (2009) menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran bantuan dan dukungan partai kepada petahana pasca bencana alam terjadi. Gasper dan Reeves (2011), menemukan bahwa pemilih menghukum petahana atas kerusakan akibat cuaca buruk yang berdampak terhadap

kondisi masyarakat, namun disisi lain memberikan penghargaan kepada petahana yang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menandatangani deklarasi sebelum pemilihan dilakukan.

Kajian pemilu dan bencana lebih awal sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya dengan memotret berbagai aspek-aspek yang mencakup sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya, termasuk di dalamnya menyangkut metode dan analisis yang digunakan oleh para peneliti. Peneliti membagi hasil penelitian terdahulu pada disertasi ini menjadi dua (2) bagian, yaitu *pertama* melihat dari sisi bencana dalam kontestasi politik terhadap kemenangan petahana pada pemilu dan *kedua* dari sisi kekalahan petahana dengan menjadikan isu penanganan bencana sebagai ajang kontestasi kekuasaan.

Salah satu kajian mengenai pemilu dalam konteks bencana adalah yang dilakukan oleh Bastos dan Miller (2013), memotret dengan sangat jelas bahwa deklarasi kekeringan yang dilakukan sebelum pertarungan politik dimulai dapat memperkuat keuntungan *elektoral* dari Walikota petahana di Brazil. Respons kebijakan terhadap kondisi cuaca ekstrem adalah tunduk pada pengaruh politik dan memiliki efek penting pada kerja demokrasi institusi serta desain dan pengelolaan kegiatan terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Amir dkk. (2013) mempertegas pernyataan tersebut dalam hasil penelitian bahwa kinerja kepala daerah pada saat darurat memiliki hubungan yang kuat antara kinerja dan peluang terpilih kembali pada situasi krisis. Argumentasi tersebut diperkuat dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Daniel Aldrich dan Yoshikuni Ono (2011), semakin banyak kerusakan semakin sering politisi menjangkau jaringan yang luas dari koneksi yang memiliki potensi manfaat untuk mereka secara politik.

Fukumoto (2024), menganalisis efek kausal dari bantuan pada hasil pemilihan oleh petahana, dengan mengambil analisis terhadap data negara Jepang dalam beberapa dekade terakhir, menunjukkan bahwa bantuan meningkatkan pangsa suara partai yang berkuasa. Bantuan per-kapita meningkat dari nol ke rata-ratanya, nilai prediksi pangsa suara partai yang berkuasa meningkat masing-masing sebesar 2,8 dan 5,4% poin di majelis rendah dan tinggi. Hasil temuan menyiratkan bahwa perolehan elektoral petahana diperoleh dengan cara membujuk pemilih dari pihak oposisi terhadap partai yang berkuasa dan bukan dengan memobilisasi pendukung partai yang berkuasa.

Gagasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Visconti (2022), bahwa kerusakan material akibat meningkatkan kemungkinan pemilih memilih kandidat sayap kiri dan independen. Warga yang terkena dampak bencana lebih cenderung memilih kandidat dengan ideologi yang dikaitkan dengan sikap, dan kebutuhan pasca terjadinya bencana. Penyaluran bantuan pemerintah dapat memperkuat kekayaan elektoral petahana, para ilmuwan telah lama memberikan argumentasinya bahwa distribusi bantuan kepada korban dapat memberikan keuntungan kepada pemerintah atau pejabat petahana. Hipotesis yang umum digunakan untuk melihat tingkat partisipasi positif yaitu argumentasi klasik dari Lipset bahwa keputusan seseorang untuk berpartisipasi bergantung pada persepsi “relevansi kebijakan pemerintah berdampak pada individu, Pemberian bantuan dapat berupa jaminan sosial (Campbell 2002). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Leonardo Baccini dan Lucas Leemann (2020), menemukan bahwa efek yang cukup besar untuk pemungutan suara pro iklim setelah mengalami banjir, di mana pembagian suara yang mendukung kebijakan pro iklim dapat meningkat sebesar 20

persen. Temuan ini berkontribusi pada literatur yang mengeksplorasi dampak kondisi lokal pada perilaku pemilih.

Melengkapi penelitian serupa didapati pada penelitian Gallego, (2015) bahwa bencana alam bermanfaat bagi para pemimpin dengan penjelasan bahwa pihak-pihak yang mengalokasikan bantuan secara strategis untuk mendapatkan suara pada pemilu menggunakan informasi dari Kantor Inspektur Jenderal Kolombia. Isu bencana saling terkait demi kelangsungan hidup pemimpin melalui *klientalisme* mereka menghasilkan aliran sumber daya dalam bentuk bantuan uang untuk membeli suara masyarakat yang memilih. Pemilih memasukkan upaya bantuan dari pejabat terpilih dalam penilaian mereka (yaitu 'retrospeksi penuh perhatian' (Healy and Malhotra, 2009). Dampak elektoral dari bencana sangat bergantung pada waktunya. Bencana alam yang melanda pada kuartal yang sama dengan pemilu memberikan dorongan elektoral yang signifikan bagi petahana, meningkatkan pangsa suara mereka lebih dari 6 poin persentase. Selain itu juga, manajemen bencana tidak hanya merupakan ujian pemerintahan tetapi juga katalis untuk ambisi politik (Taheri, 2025).

Pada penelitian Andrews (2022), menemukan fakta bahwa, seorang pemimpin yang peka dan responsif terhadap kebutuhan pencegahan akan lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat daripada pemimpin yang tidak responsif. Sikap tanggap dari pemimpin terhadap situasi krisis adalah strategi membangun kepercayaan publik guna memperkuat keuntungan elektoral secara maksimal. Jowei Chen, (2013), pengiriman bantuan oleh pemerintah meningkatkan tingkat kehadiran partai yang berkuasa tetapi mengurangi tingkat kehadiran partai oposisi. Intuisi teoretis di sini adalah bahwa seorang petahana yang memberikan manfaat distribusi kepada

pemilih partai oposisi sebagian mengurangi oposisi ideologis pemilih ini terhadap petahana, sehingga melemahkan motivasi mereka untuk hadir dan menggulingkan petahana. Analisis data tingkat individu tentang penghargaan bantuan badai FEMA di Florida. Penyaluran bantuan yang diberikan selama minggu sebelum pemilihan November 2004 memiliki efek yang sangat besar pada pemilih, meningkatkan probabilitas kehadiran pemilih Republik (partai yang berkuasa) sebesar 5,1% dan mengurangi kehadiran pemilih Demokrat (partai oposisi) sebesar 3,1%. Namun, bantuan yang diberikan segera setelah pemilihan tidak memiliki efek pada kehadiran pada hari pemilihan.

Masiero (2021), Terjadinya gempa bumi mengubah perilaku pemilih dalam pemilihan umum kota di mana petahana mencalonkan diri kembali antara tahun 1993 dan 2015 di Italia. Kajian menemukan bahwa terjadinya gempa bumi yang merusak secara signifikan meningkatkan peluang petahana untuk terpilih kembali dan pangsa suara mereka. Hasil ini didorong oleh keunggulan petahana dalam menawarkan pemulihan dari kerusakan yang dikombinasikan dengan visibilitas yang lebih tinggi di media. Dengan demikian, relevansi media tidak dari kejadian gempa bumi dapat membuat pemilih condong ke arah petahana.

Albrecht, (2021), dalam situasi pemulihan pasca bencana, pihak oposisi membangun narasi kegagalan pemerintah, paling tidak dengan mengaitkan peristiwa tersebut dengan situasi politik atau politisasi. Povetkina dkk, (2025), menemukan bahwa negara yang mengalami bencana alam juga mengalami peningkatan dalam kebebasan berekspresi, partisipasi masyarakat sipil, dan beberapa aspek persaingan politik, tetapi hanya dalam jangka pendek. Garret (2007), dampak deklarasi dan alokasi pengeluaran terhadap tahun pemilihan adalah

hampir dari seluruh bantuan dimotivasi oleh motif politik. Scott Ashworth, Ethan Bueno de Mesquita, Amanda Friedenberg, (2017), Peristiwa bencana alam semacam itu dapat mempengaruhi hasil pemilu, alasannya adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini mengubah peluang pemilih untuk mempelajari informasi baru tentang petahana.

Rubin (2019) bencana alam tidak hanya memiliki dampak sosial ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi politik. Sarah Birch, (2022) perubahan posisi partai pada isu-isu lingkungan tampaknya lebih meyakinkan dalam menjelaskan pergeseran dukungan elektoral sebagai respons terhadap bencana banjir. Hal ini menunjukkan bahwa partai dapat memperoleh keuntungan dari, atau dihukum karena, posisi yang mereka ambil pada isu-isu lingkungan ketika peristiwa cuaca ekstrem memengaruhi warga. Bodet dkk, (2016) menunjukkan bahwa dukungan untuk Wali Kota petahana meningkat setelah bencana banjir menerjang seluruh kota Calgary di Kanada. Studi kasus pada pemilihan tahun 2010 dan 2013 tetapi dengan tingkat yang lebih rendah di daerah yang mengalami banjir perumahan. Namun, bencana banjir tersebut tidak menghasilkan kelompok perlakuan dan kontrol yang setara, karena daerah yang terendam banjir berbeda secara sistematis dari daerah yang tidak terendam banjir dalam hal-hal penting yang memengaruhi hasil pemilihan. Jika dianalisis secara lebih konservatif, hasilnya menunjukkan bahwa banjir tidak berpengaruh pada dukungan terhadap petahana atau tingkat partisipasi pemilih. Dengan demikian, bencana ini menghadirkan catatan peringatan dalam literatur yang meneliti dampak bencana alam terhadap perilaku elektoral.

Fenomena pemilu dalam konteks bencana dari sisi kekalahan petahana yakni penelitian yang dilakukan oleh Boris Heersink dkk (2021) dan (Kosta Bovan dkk, 2018). Penelitian dimulai dengan memberikan pertanyaan, apakah bencana alam membantu atau merusak kekayaan *elektoral* politisi? penelitian menegaskan bahwa bertentangan dengan penelitian lainnya. Penelitian lain menemukan bahwa pemilih menghukum pejabat terpilih tanpa pandang bulu setelah bencana alam terjadi yaitu disebut dengan 'retrospeksi buta' (Achen dan Bartels, 2016).

Sedangkan Heersink (2021) menemukan bahwa kandidat partai petahana tampil tidak lebih buruk di kabupaten koportisan yang terkena dampak bencana daripada di kabupaten kopartisan yang tidak terkena dampak bencana, tetapi mereka berkinerja buruk di kabupaten yang terkena karena dipengaruhi oleh sikap sebelum terjadi yaitu 'retrospeksi partisan'. Kosta Bovan dkk (2018), menemukan bahwa jumlah penyaluran bantuan pemerintah sesungguhnya tidak berdampak pada perilaku pemilih pasca bencana alam terjadi, dengan menggunakan model pemilih retrospeksi (Kosta Bovan dkk, 2018). Morvan (2024), bencana alam dapat mempengaruhi keputusan pemilih, terjadinya bencana alam secara signifikan menurunkan peluang terpilihnya kembali petahana. Fiorina (1981), pada kajiannya menemukan bahwa, dengan informasi yang terbatas, pemilih dapat secara efektif meminta pertanggung jawaban para pemimpin atas hasil yang nyata, sehingga memberi insentif terhadap tata kelola yang baik.

Retrospeksi buta membangun argumentasi bahwa pemilih menghukum petahana untuk peristiwa yang memang berada di luar kendali mereka. Achen dan Bartels (2017), menunjukkan bahwa pemilih menghukum petahana untuk berbagai kejadian, mulai dari bencana kekeringan dan serangan hiu. Pemilih tidak

menghukum politisi dan petahana untuk bencana itu sendiri, tetapi mereka mengevaluasi respons pemerintah terhadap bencana (Archeaux and Stein, 2006: Gasver dan Reeves, 2011).

Bencana alam merupakan peristiwa diluar kendali pemerintah, namun demikian pemerintah harus memberikan respons terhadap hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab. Berdasarkan teori pemungutan retrospeksi berpandangan bahwa pemerintah maupun politisi memiliki tanggung jawab atas semua dampak dari bencana alam. (As Ashworth, Bueno de Mesquita, & Friedenberg, 2018; Cole, Healy, dan Werker, 2012; Eriksson, 2016; Fuchs dan Rodriguez-Chamussy, 2014; Quiroz-Flores dan Smith, 2013; Sejauh mana pemilih menyalahkan petahana tergantung pada berbagai faktor seperti bias partisan dan tanggung jawab hukum pejabat terpilih (Arceneaux & Stein, 2006; Malhotra dan Kuo, 2007; Rudolph, 2003a, 2003b). Barnhart (1925), bencana alam tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dapat mengubah lanskap politik dengan mengurangi dukungan untuk pemimpin yang sedang menjabat. Menurut Pehjhon (1986), peluang untuk terpilih kembali bagi petahana sangat tergantung pada Kinerja petahana untuk mempertahankan dukungan pemilih. Apabila kinerjanya dianggap baik maka peluang terpilih kembali sangat terbuka sebaliknya juga jika kinerja dianggap buruk maka dapat mempersempit peluang terpilih kembali.

Akhirnya, dari hasil penelusuran penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kontestasi politik pemilu dan bencana dapat memberikan beberapa hasil dan keputusan, yaitu:

Pertama, dengan menjadikan retrospeksi buta sebagai landasan tujuan utama mereka, seperti penelitian dari, Bastos dan Miller (2013), Giancarlo Visconti

(2022), Baccini and Leemann (2020), Jorge Gallego, (2015:21), Amir Horkin dkk. (2013), Aldrich dan Yoshikuni Ono (2016), Leigh (2009). Bechtel dan Hainmueller (2011). Oleg Smirnov (2018). Ramos San Carlos Sanz (2018). Oleg Smirnov, dkk 2018. Hazlett and Matto Mildemberger 2020). Para peneliti tersebut telah mendirikan landasan teori untuk “Restropeksi Buta”, menemukan bahwa terdapat hubungan (*korelasi*) antara kinerja pada masa pemulihan pasca bencana dengan perilaku pemilih sebagai bentuk perlawanan (*resistensi*) terhadap pemerintah (petahana).

Kedua, kontestasi politik dalam dari sisi kemenangan dengan menjadikan masa pemulihan pasca bencana, sebagai medium mendapatkan dukungan politik, diantaranya kajian yang dilakukan oleh, Boris Heersink dkk (2021), Archen dan Bartels (2016). Gasveer dan Reeves (2011). Kosta Bovan dkk. (2018). Healy dan Malhotra (2009). Wolfers (2006), Bechtel dan Hainmueller (2011), Roberto Ramos san Carlos Sanz (2018), menegaskan teori “Retrospeksi Penuh Perhatian” bahwa terdapat hubungan (*korelasi*) positif antara belanja bantuan dan dukungan pemilih untuk partai petahana dalam pemilu. Pemilih melakukan introspeksi penuh perhatian terhadap petahana dengan memberikan penilaian terhadap pejabat (petahana) berdasarkan operasi bantuan yang dilakukan setelah terjadi. Talbot M.Andrews, (2022), menegaskan bahwa respons pemimpin terhadap situasi pencegahan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari publik.

Boris Heersink dkk, (2022), dan (Kosta Bovan dkk, 2018). Menegaskan bahwa terdapat hubungan (*korelasi*) antara dampak terhadap keberlangsungan politisi atau petahana dalam kontestasi politik. Namun, Boris Heersink (2022) menambahkan satu teori dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu “Retrospeksi Partisan” bahwa

pemilih memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada petahana setelah terjadi dipengaruhi oleh apakah pejabat tersebut merupakan rekan atau tidak (partisan kekerabatan dan politik) sikap pemilih terhadap kerusakan akibat alam sangat dipengaruhi oleh sikap keberpihakan yang sudah ada sebelumnya, baik itu terhadap partai politik pendukung maupun calon petahana. Kim, dkk, (2025), dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa mereka lebih menyukai pencegahan ketika warga negara tidak kooperatif dan kurang mendukung pemberian bantuan kepada warga yang tidak kooperatif dibandingkan dengan warga negara yang kooperatif. Artinya pertimbangan pencegahan merupakan salah satu indikator yang menjadikan pertimbangan dalam keputusan untuk mendukung atau tidak mendukung kandidat dalam kontestasi sebuah pemulihan pasca bencana.

Dari hasil kajian pemilu dalam konteks bencana di atas, tidak banyak ditemukan penelitian yang membahas secara detail bagaimana hubungan (*korelasi*) antara pemilu, dan kekalahan petahana. Para peneliti lebih dominan melihat bahwa pemilu dari sisi kemenangan petahana dengan memanfaatkan situasi sebagai arena pertarungan politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat di daerah pasca bencana. Dalam hal ini, membahas pemilu dan bencana dan petahana menjadi sangat penting, mengingat bahwa dalam situasi krisis peran negara yang terwakili oleh pejabat petahana, sebagai jembatan pemerintah pusat di daerah harus mampu menempatkan posisi sebagai penyeimbang kepentingan publik, seperti pandangan kelompok teori yang menyatakan bahwa negara pada dasarnya netral bebas dari kepentingan kelompok maupun personal.

Oleh karena itu, disertasi ini terkonsentrasi pada tema yang kedua yang belum banyak mendapatkan perhatian, yakni bencana dalam kontestasi politik dan

kekalahan petahana sebagai objek utamanya. Kekalahan petahana dalam mempertahankan kekuasaan diindikasikan karena ketidakmampuan petahana dalam mengelola isu bencana menjadi peluang tetapi justru menjadi batu sandungan dalam melanggengkan kekuasaan politik secara berkelanjutan oleh politisi atau petahana.

Mempertimbangkan dan melihat tema serta relevansi gagasan pada penjelasan di atas, disertasi ini bermaksud menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai studi kasus penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya yaitu, *pertama*, bahwa Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah akibat gempa bumi pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Kedua*, bahwa Pilkada berisirsan dengan proses pemulihan pasca bencana alam terjadi, dan *Ketiga*, pelaksanaan Pilkada juga dilaksanakan pada saat masa Pandemi Covid-19 melanda semua daerah di Indonesia.

Dampak gempa yang terjadi di Lombok Utara pada tahun 2018, menyebabkan banyaknya korban jiwa meninggal dunia, ratusan ribu jiwa mengungsi akibat tidak memiliki tempat tinggal, karena bangunan rumah mengalami rusak berat, sedang, maupun rusak ringan. Selain itu, berbagai fasilitas publik juga banyak mengalami kerusakan, seperti Kantor-kantor Pemerintahan, Rumah sakit serta fasilitas pemerintah pendukung layanan publik mengalami kerusakan secara total. Data berikut memperlihatkan kerusakan yang terjadi di KLU:

Tabel. 1.1
Data Kerusakan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara 2018

No	Tipe Kerusakan dan Korban	Jumlah
1	Meninggal Dunia	537 Jiwa
2	Luka-luka	2.012 Jiwa
3	Mengungsi	101.735 Jiwa
4	Rumah Rusak	76.000

Sumber: Laporan BPBD, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2020.

Data di atas menunjukan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi pada tahun 2018 sangat besar mulai dari menelan korban jiwa, luka-luka, pengungsian serta rusaknya rumah penduduk yang mencapai 16.520 unit. Transisi pemulihan daerah pasca terjadinya alam diikuti oleh pelaksanaan tahapan yang begitu kental dengan kepentingan politik. Pelaksanaan di daerah pasca terjadinya bencana alam tentunya berbeda dengan yang dilaksanakan pada kondisi normal, konsentrasi pemerintah menjadi terpecah di satu sisi melakukan proses pemulihan pasca bencana terjadi dari semua aspek kehidupan sosial masyarakat, dan di sisi yang lain melaksanakan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 serta menyongsong pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 yang beririsan dengan masa pemulihan daerah pasca terjadinya gempa bumi 2018 menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah menjadi lebih berat. Distribusi bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak sangat banyak terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat sehingga warga masyarakat merasa sangat terbantu dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak termasuk politisi.

Transisi pemulihan daerah pasca terjadinya bencana alam diikuti oleh pelaksanaan tahapan yang begitu kental dengan kepentingan politik. Pelaksanaan di daerah pasca terjadinya alam dan non alam (pandemi covid-19) tentunya berbeda

dengan yang dilaksanakan pada kondisi normal, konsentrasi pemerintah menjadi terpecah satu sisi melakukan proses pemulihan pasca bencana dari semua aspek kehidupan sosial masyarakat, dan di sisi yang lain melaksanakan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 serta menyongsong pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 yang beririsan dengan masa pemulihan daerah. (BPBD Lombok Utara, 2020).

Selain menghadapi bencana alam pada proses masa transisi pemulihan, pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Lombok Utara juga dilaksanakan pada saat pandemi melanda seluruh dunia. Kondisi ini semakin menambah pekerjaan rumah pemerintah daerah menjadi lebih berat. Dalam penyelenggaraan serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 dilatarbelakangi oleh urgensi perwujudan demokrasi pada tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri Negara Republik Indonesia memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan serentak 2020 meskipun negara masih dalam situasi darurat kesehatan. Pasalnya, Keputusan tersebut ditengarai oleh beberapa urgensi, antara lain: (1) Merupakan Keputusan bersama antara pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilihan Umum. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020, ketika terdapat kesepakatan di antara ketiga Lembaga yang dimaksud, maka akan dilaksanakan. (2) wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan sebagai momentum untuk meraih kesempatan dalam memerangi pandemi covid-19 melalui terpilihnya Kepala Daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi covid-19 di daerahnya. (3) memacu perekonomian di tengah

krisis pandemi covid-19 melalui kebijakan-kebijakan yang diusulkan Kepala Daerah periode selanjutnya. (<https://nasional.kompas.com>)

Proses penanganan dan pemulihan daerah pasca bencana alam dan non alam Pandemi Covid-19 menunjukan hasil positif dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak, namun di sisi yang lain tidak bagi proses pelaksanaan tahapan yang banyak mengalami persoalan. Menjalankan tahapan pemilihan dalam kondisi krisis memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menjadikan situasi sebagai sarana memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Gerakan politik yang berbasis kemanusiaan, kerap kali ditemukan di lapangan dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk meyakinkan pemilih, salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada para korban bencana dan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di tempat pengungsian. Sehingga isu bencana menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi politik dan tentunya berpeluang untuk dimenangkan oleh petahana dengan daya dukung yang dimiliki lebih besar. Menurut Habibi, bahwa dalam situasi Pandemi para kandidat dan peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih pada situasi pandemik. Karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal. Meskipun begitu, calon penguasa lokal tetap mengeluarkan biaya tidak terduga. Biaya politik akan bertambah yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok pemilih dalam situasi krisis (Habibi, 2020).

Tarquino pada penelitian menemukan bahwa keunggulan petahana menyiratkan bahwa suara partai yang berkuasa akan menjadi lebih tinggi pada situasi karena distribusi bantuan oleh pemerintah maupun politisi partai yang berkuasa akan lebih terbuka menyasar pemilih (Tarquino, 2020). Kebutuhan

masyarakat akan sandang papan, dan pangan akan menjadi alat untuk mengambil simpati masyarakat guna mendapatkan dukungan secara politik. Pertarungan dalam meyakinkan pemilih pada situasi krisis pasca bencana menjadi lebih menarik bila dibandingkan dengan kondisi normal, pertarungan tidak hanya berkutat pada aspek visi dan misi di atas kertas namun lebih luas mencakup kemampuan pasangan calon untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan secara cepat dan akurat. Pertarungan politik pada situasi sebagian besar menunjukkan keuntungan terhadap pejabat publik yang berkuasa atau petahana, dengan memanfaatkan kondisi pemulihan sebagai ajang untuk mendapatkan dukungan publik atau restorasi penuh perhatian.

Namun, fakta menunjukkan bahwa Pasangan Najmul Akhyar dan H, Suardi sebagai petahana pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020 mengalami kekalahan, meskipun memiliki daya dukung sumber daya politik yang kuat dalam konstelasi politik seperti: mendapatkan dukungan dari partai mayoritas, menguasai mesin birokrasi, menjadi orang kuat lokal, dari perspektif keagamaan, memiliki kebijakan dan akses kepada masyarakat lebih luas. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua petahana mampu mempertahankan kekuasaannya pada kontestasi politik, seperti apa yang dijelaskan oleh hasil kajian-kajian terdahulu pada pembahasan sebelumnya.

Kekalahan petahana NADI merupakan “*Retrospektive Multiplication effect Theory*” yang terbentuk dari efek platuk ganda (*dual-trigger effect*) bahwa kegagalan struktural memperluas jangkauan terhadap *destruktif operasional* birokrasi daerah yang tidak berjalan maksimal karena kendala teknis. Dominasi kekalahan petahana pada kontestasi kekuasaan lokal terletak pada integrasi faktual

antara *Misattributd Blink Retrospection* dan *Negative Mindful Retrospection* yang tidak dapat di diktomi secara parsial melainkan harus di letakan secara utuh.

Kegagalan sistemik yang berasal dari pemerintah pusat menjadi pemicu gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja birokrasi di daerah dengan berbagai dinamika teknis yang terjadi pada wilayah akar rumput. Dalam situasi krisis publik tidak memisahkan batasan kewenangan pusat dan daerah terkait dengan jangkauan masing-masing secara administrasi, tetapi di kalkulasi sebagai kegagalan pemerintah daerah yang dianggap sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan identifikasi kendala struktural penanganan bencana gempa di KLU, terdapat kendala secara struktural diantaranya: (1) otoritas anggaran berada pada kendali penuh pemerintah pusat (2) proses verifikasi birokrasi dan anggaran secara berjenjang (3) terjadinya perubahan regulasi (4) pemblokiran dana stimulan secara berkelanjutan (5) dan pola penyaluran bantuan secara bertahap menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat.

Keterbatasan dan keterlambatan dukungan otoritas anggaran pemerintah pusat menimbulkan berbagai bentuk efek domino di daerah. Kendala operasional dan administrasi dalam penanganan masa transisi pemulihan tidak hanya berdampak kepada teknis pelaksanaan pembangunan tetapi berkolerasi terhadap kepercayaan publik pada calon petahana. Isu pembangunan rumah tahan gempa dan jaminan sosial pada korban bencana dinilai tidak maksimal dari sisi distribusi karena hal mekanisme dan pencairan sangat prosedural berjenjang serta berlapis yang menyulitkan proses pencairan. Kendala operasional menyangkut beberapa hal pokok, seperti: (1) terjadinya sengketa data rumah (2) sengketa dan status legalitas lahan karena warga banyak kehilangan dokumen sertifikat (3) keterbatasan

fasilitator (4) banyak ditemukan konstruksi bangunan perumahan tidak sesuai dengan standar (5) kesadaran masyarakat yang engn mengurus Pokmas (6) kelangkaan dan kenaikan harga material bangunan RTG (7) dan kurangnya pengawasan serta fasilitator terlatih.

Atas dasar argumen yang telah disampaikan di atas, maka penelitian yang berjudul “Dari Isu Kebijakan ke Politik Elektoral: Bencana dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020” dalam perspektif kekalahan petahana, Pada Pilkada Lombok Utara tahun 2020” masih relevan dan menarik untuk teliti.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah para kandidat membangun isu bencana sebagai isu utama dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2020?
2. Bagaimana isu penanganan bencana dapat mendorong rusaknya suara petahana pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pergeseran sebuah isu dari isu penanganan bencana menjadi isu kebijakan sampai pada politik elektoral berimplikasi terhadap tumbangnya petahana pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara 2020. Adapun beberapa tujuan penelitian pada disertasi ini yaitu:

- (1) Menganalisis bagaimana para kandidat membangun isu bencana sebagai isu utama dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020.
- (2) Menganalisis isu penanganan bencana mendorong rusaknya suara petahana pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 serta bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi secara politik.
- (3) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan petahana mengalami kekalahan pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademik penelitian sebuah disertasi tentunya diharapkan dapat memperkaya khazanah tentang bagaimana pergeseran sebuah isu dari isu penanganan bencana menjadi isu kebijakan sampai pada politik elektoral berimplikasi terhadap kekalahan petahana pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara 2020. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian keilmuan bidang ilmu politik yang terkonsentrasi pada isu bencana, kebijakan dan politik elektoral yakni:

- (1) Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskusi mengenai “kontestasi politik dan bencana” dalam perspektif kekalahan petahana pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang belum banyak mendapatkan perhatian oleh para peneliti;

(2) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kontestasi politik dalam situasi bencana.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini melihat kontestasi politik dan bencana bertumpu pada bagaimana pergeseran sebuah isu menjadi isu kebijakan sampai pada politik elektoral berimplikasi terhadap tumbangnya petahana di daerah bencana di lihat dari perspektif kekalahan petahana. Penelitian ini lebih berorientasi pada bagaimana isu bencana sebagai ajang kontestasi kekuasaan yang dilakukan oleh para kandidat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis kemampuan politisi untuk memenangkan pertarungan politik, tetapi lebih pada bagaimana kekalahan petahana dipotret pada dinamika tata kelola isu bencana yang bersifat struktural maupun operasional sehingga berdampak petahana tumbang pada perhelatan kontestasi politik elektoral.